

## ANALISIS PENGARUH IPM, TPT, DAN UMR TERHADAP JUMLAH PENDUDUK MISKIN DI INDONESIA DENGAN MENGGUNAKAN REGRESI DATA PANEL

Frido Evindey Manihuruk<sup>1</sup>, Joko Suharianto<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Medan

e-mail: [fridomanihuruk289@gmail.com](mailto:fridomanihuruk289@gmail.com)

### Abstrak

Penelitian memiliki tujuan memahami bagaimana pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), dan Upah Minimum Regional (UMR) terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia. Analisis kuantitatif ini memakai regresi data panel dengan data tahun 2018 hingga 2022 dari 34 provinsi yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan menggunakan *Fixed Effect Model* (FEM). Setelah pengujian Chow dan Hausman, model tersebut ditemukan memiliki kesesuaian yang baik dan memungkinkan dilakukannya pengujian asumsi klasik, parsial, dan simultan. Output dari analisis data memperlihatkan bahwa terdapat hubungan yang berbanding terbalik dan signifikan antara IPM dengan kemiskinan, sedangkan TPT dan UMR menunjukkan hubungan yang positif dan signifikan dengan tingkat kemiskinan di Indonesia. Hasil output memperlihatkan terdapat hubungan negatif dan signifikan antara IPM dengan kemiskinan, sedangkan TPT dan UMR menunjukkan hubungan positif dan signifikan dengan jumlah penduduk miskin di Indonesia. Model ini mempunyai koefisien determinasi sebesar 99,83% dan berhasil menjelaskan sebagian besar variasi kemiskinan. Hasil ini diharapkan dapat menyumbangkan wawasan yang mendalam terhadap variabel-variabel yang diteliti dan memberikan kontribusi penting dalam perancangan kebijakan ekonomi nasional untuk pengentasan kemiskinan di Indonesia.

**Kata Kunci:** Indeks Pembangunan Manusia, Pengangguran, Upah Minimum Regional, Jumlah Penduduk Miskin, Data Panel

### PENDAHULUAN

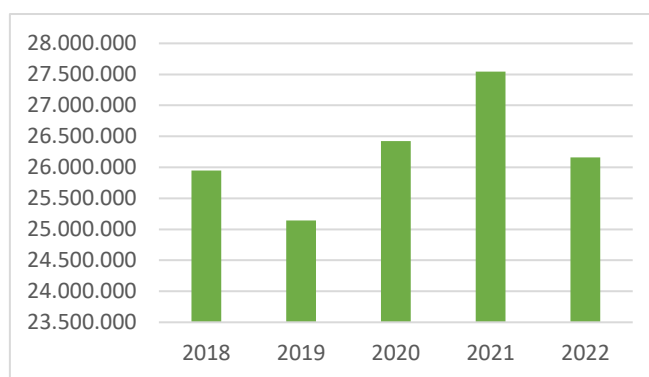
Indonesia sebagai negara berkembang yang masih banyak memiliki masalah perekonomian baik secara mikro dan makro. Masalah ekonomi tersebut umumnya mendasar seperti masalah tentang kesejahteraan, ketergantungan, kriminalitas yang tinggi, hingga keterbatasan dalam mengakses layanan sosial. Hal tersebut terjadi karena ketidakmerataan pendapatan sehingga masyarakat tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*) yang disebut dengan masalah sosial kemiskinan. Kemiskinan dianggap sebagai ketidakseimbangan pertumbuhan ekonomi yang merupakan tantangan dalam pembangunan. Dampak negatif dari ketidakseimbangan ini dapat menyebabkan perbedaan pendapatan antar masyarakat dan daerah (*inter region income gap*) (Harahap 2006).

Pada dasarnya, kualitas hidup masyarakat tidak hanya tergantung pada pemenuhan kebutuhan pangan, melainkan juga terkait dengan penyediaan layanan kesehatan, pendidikan, dan lapangan pekerjaan. Kondisi tempat tinggal atau permukiman yang memadai menjadi satu diantara indikator standar hidup atau kesejahteraan masyarakat dalam suatu wilayah. Dengan mengacu pada situasi ini, masyarakat dianggap kurang mampu jika pendapatannya jauh di bawah rata-rata, sehingga peluang untuk meningkatkan kesejahteraan diri menjadi terbatas (Suryawati 2004).

Kemiskinan telah menjadi perhatian dunia selama periode yang panjang, dikarenakan dampaknya yang signifikan terhadap kehidupan manusia dan kemajuan suatu negara. Tidak hanya menjadi isu lokal, kemiskinan juga menjadi tantangan global yang memerlukan perhatian serius dan solusi berkelanjutan. Kemiskinan adalah keadaan ketika seseorang tidak memiliki sarana keuangan dan modal/aset kekuatan yang diperlukan untuk melengkapi kebutuhan fundamental dan mempertahankan standar hidup yang layak. Hal ini terjadi ketika pendapatan tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan dasar, yang mengindikasikan kondisi kemiskinan (Kuncoro 2004).

Menurut Adisasmita (2013) parameter yang digunakan untuk mengukur kemiskinan meliputi upah atau ambang batas pendapatan, pola konsumsi, tingkat mortalitas BALITA, tingkat imunisasi, prevalensi malnutrisi pada anak, tingkat kesuburan, tingkat mortalitas ibu, usia rata-rata harapan hidup, tingkat partisipasi pada pendidikan dasar, alokasi dana pemerintah untuk layanan masyarakat yang esensial, kecukupan asupan makanan, akses terhadap air bersih, tingkat pertumbuhan penduduk, tingkat melek huruf, tingkat urbanisasi, pendapatan per kapita, dan ketidaksetaraan pendapatan.

Peningkatan jumlah penduduk miskin tidak hanya merupakan permasalahan ekonomi semata, melainkan melibatkan aspek-aspek sosial, pendidikan, kesehatan, dan keadilan. Setiap individu yang mengalami kemiskinan tidak hanya menghadapi keterbatasan finansial, tetapi juga risiko terbatasnya kesempatan atas pendidikan yang baik, layanan kesehatan berkualitas, dan peluang ekonomi yang sebanding. Oleh karena itu, pemahaman mendalam terhadap faktor dan indikator lain yang memengaruhi jumlah penduduk miskin menjadi kunci dalam merancang kebijakan yang bersifat holistik dan efektif. Berikut disajikan grafik jumlah penduduk miskin di Indonesia dari tahun 2018 hingga 2022.



**Gambar 1.** Grafik jumlah penduduk miskin di Indonesia (2018-2022)

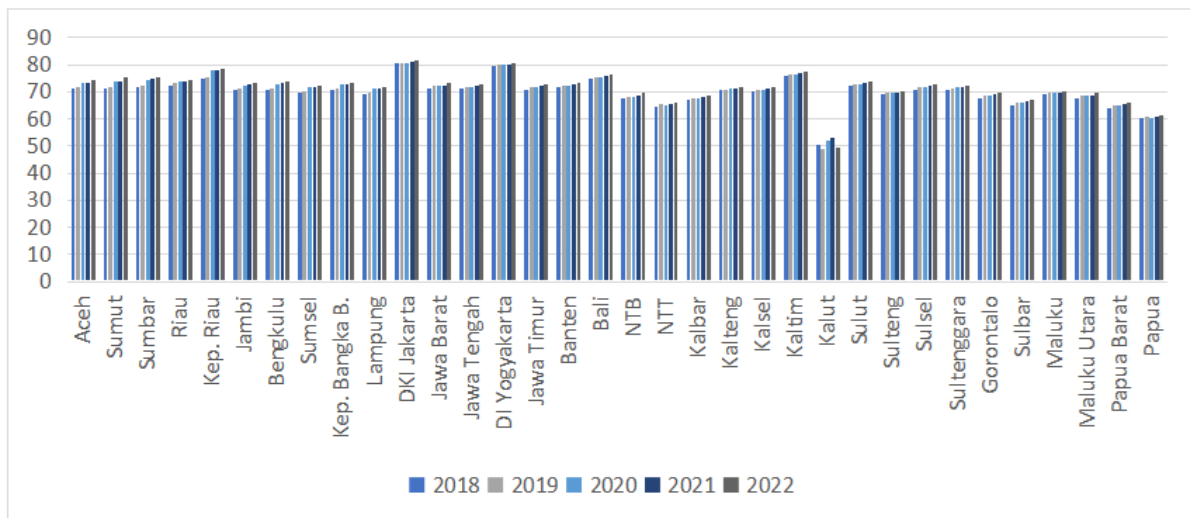
Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa tren perkembangan jumlah penduduk miskin di Indonesia umumnya berfluktuasi dari tahun 2018-2022 dengan adanya peningkatan di tahun 2020 dan puncaknya di tahun 2021 karena pengaruh pandemi covid-19. Dapat dilihat dari data bahwa jumlah populasi yang berada dibawah garis kemiskinan terbanyak terdapat pada tahun 2021 yaitu sebanyak 27,5 juta jiwa dengan jumlah perubahan terbesar terjadi pada tahun 2022 yaitu terjadi penurunan sebanyak 1,3 juta jiwa. Apabila dibandingkan dengan populasi total Indonesia, pucak tertinggi jumlah penduduk terjadi pada tahun 2021 yaitu sebesar 10,10%, disusul pada tahun 2020 (9,77%), 2018 (9,82%), 2022 (9,48%), dan terendah pada tahun 2019 (9,42%) berdasarkan data penelitian.

Ketidakmampuan sumber daya manusia juga menjadi salah satu pemicu kemiskinan. Tanpa keahlian yang memadai, individu akan kesulitan mendapatkan penghasilan yang cukup, yang pada gilirannya mengurangi daya beli mereka dan memasukkan mereka ke dalam lingkaran kemiskinan. Dampaknya tidak hanya terbatas pada tingkat individu, tetapi juga dapat mengganggu pertumbuhan ekonomi wilayah atau bahkan negara secara keseluruhan. Tingkat keterampilan manusia berpotensi memengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) serta tingkat pengangguran sebagai faktor yang diperhatikan dalam menangani masalah kemiskinan (Prasetyoningrum and Sukmawati 2018).

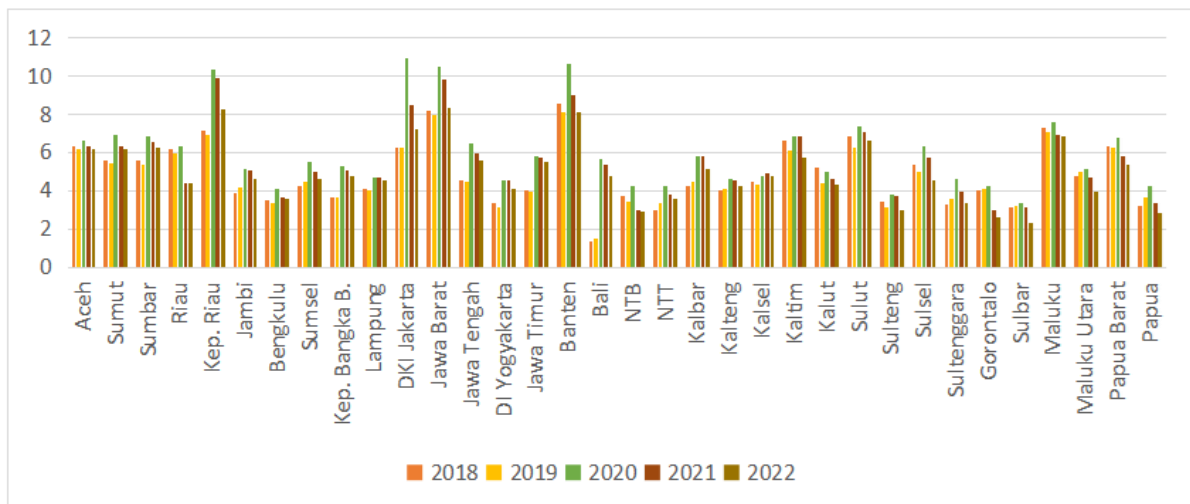
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah sebuah metrik untuk menilai prestasi kualitas manusia dengan mempertimbangkan beberapa aspek utama kualitas hidup yang berpotensi memengaruhi tingkat produktivitas individu (Saputra 2011). IPM mengevaluasi tiga dimensi utama yang meliputi umur yang panjang dan sehat, mendorong pendidikan dan pengetahuan, dan mempromosikan standar hidup yang memuaskan (Nugroho and Clarissa 2019).

Pengangguran terjadi ketika individu yang sedang mencari pekerjaan secara aktif tidak berhasil mendapatkan pekerjaan. Individu yang tidak terlibat dalam aktivitas pekerjaan dan tidak aktif mencari pekerjaan tidak termasuk dalam kategori pengangguran. Penyebab utama pengangguran adalah pengeluaran agregat yang tidak mencukupi. Ada berbagai jenis pengangguran, seperti pengangguran terbuka, tersembunyi, musiman, dan setengah menganggur, yang masing-masing memiliki ciri-ciri yang berbeda. Pengangguran terbuka muncul ketika kesempatan kerja tidak sebanding dengan jumlah orang yang mencari pekerjaan. Hal ini dapat disebabkan oleh kemajuan teknologi yang mengurangi permintaan pekerjaan atau penurunan dalam industri tertentu (Sukirno 2019).

Berikut disajikan grafik pembangunan manusia (IPM) dan pengangguran terbuka (TPT) dalam % menurut 34 provinsi di Indonesia dari tahun 2018 hingga 2022 :



Gambar 2. Grafik IPM menurut provinsi di Indonesia (2018-2022)



Gambar 3. Grafik TPT menurut provinsi di Indonesia (2018-2022)

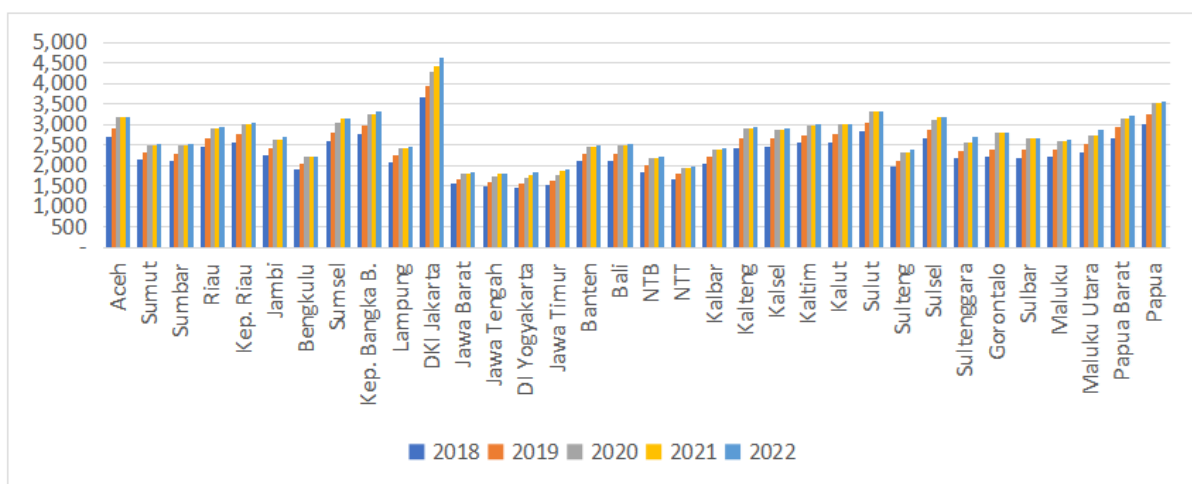
Berdasarkan gambar 2 dan 3, perkembangan IPM di Indonesia umumnya meningkat dari tahun ke tahun, dengan IPM tertinggi pada tahun 2022 dan terendah pada tahun 2018. Menurut provinsi, IPM tertinggi secara keseluruhan (2018-2022) diperoleh oleh provinsi DKI Jakarta dengan rata-rata IPM 80,95 dan IPM terendah dengan rata-rata 50,64 di provinsi Kalimantan Utara. Pada perkembangan TPT di Indonesia terjadi kenaikan dan penurunan, dengan TPT tertinggi terjadi pada tahun 2021 (6,03%) dan terendah pada tahun 2018 (4,85%). Apabila dilihat pada tiap provinsi, TPT tertinggi terjadi di

wilayah Jawa Barat dengan rata-rata 8,95% dan yang paling rendah terdapat di provinsi Sulawesi Barat dengan rata-rata 3,02%.

Salah satu metode untuk meningkatkan distribusi pendapatan dan berpotensi mengentaskan kemiskinan adalah dengan menerapkan strategi pembangunan ekonomi. Pendekatan ini menegaskan pembangunan ekonomi menjadi proses progresif yang mengarah pada peningkatan pendapatan per kapita, bahkan selama periode penurunan ekonomi (Zulkifli 2016). Dalam distribusi pendapatan perlu adanya kebijakan yang mengatur agar pendapatan yang didistribusikan tepat sasaran. Kebijakan tersebut dapat berupa penetapan upah minimal dalam satu daerah.

Tingkat upah minimum untuk suatu wilayah dikenal sebagai Upah Minimum Regional (UMR) dimana terdapat perbedaan antar wilayah. Penetapan UMR didasarkan pada pertimbangan kebutuhan hidup layak (KLH), indeks harga konsumen, tingkat perkembangan perusahaan, dan kemampuan ekonomi regional. UMR sebaiknya tidak terlalu jauh berbeda dari tingkat upah rata-rata yang berlaku di pasar tenaga kerja. Jika upah minimum ditetapkan pada tingkat yang dianggap berlebihan, pemberi kerja mungkin akan berhati-hati dalam memilih tenaga kerja, memilih individu yang menunjukkan produktivitas dan efisiensi yang sesungguhnya. Akibatnya, tingkat upah minimum yang terlalu tinggi tidak akan berpengaruh terhadap pengangguran, dan hanya memberikan perlindungan kepada mereka yang sudah memiliki posisi pekerjaan (Suparmoko 2009).

Berikut disajikan grafik Upah Minimum Regional (UMR) menurut provinsi di Indonesia dari tahun 2018 hingga 2022.



**Gambar 4.** Grafik UMR menurut provinsi di Indonesia dalam ribu Rupiah (2018-2022)

Dari gambar 4 dapat diperoleh informasi bahwa UMR provinsi di Indonesia setiap tahun nya mengalami peningkatan dengan rata-rata Rp 115.750,- per tahunnya. Jakarta menjadi provinsi dengan UMR tertinggi dengan rata-rata Rp 4.184.200,- dan UMR terendah sebesar Rp 1.362.400,- yang terdapat di provinsi Jawa Timur.

Teori neo-klasik menyatakan bahwa di pasar tenaga kerja, upah dapat disesuaikan, memastikan keseimbangan antara penawaran dan permintaan tenaga kerja, sehingga mencegah pengangguran. Hal ini mengimplikasikan bahwa pada tingkat upah yang ada, siapa pun yang bersedia bekerja akan mendapatkan pekerjaan. Pengangguran hanya disebabkan oleh individu yang memilih untuk tidak bekerja pada tingkat upah yang sudah ditetapkan, yang membuat mereka menganggur secara sukarela.

Menurut teori neo-klasik yang dikemukakan oleh Robert Solow dan Trevor Swan mengatakan tidak selamanya upah yang tinggi dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di suatu daerah yang luas. Hal tersebut terjadi karena upah hanya diperuntukkan bagi masyarakat yang memiliki pekerjaan.

Dimana salah satu indikator masyarakat yang sejahtera adalah masyarakat yang tebebas dari garis kemiskinan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa upah yang tinggi di satu daerah tidak selamanya dapat mengurangi kemiskinan didaerah tersebut, karena kebanyakan penduduk miskin adalah masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan, sedangkan upah hanya diberikan kepada masyarakat yang bekerja (Suparmoko 2009).

Seperti yang telah dibahas diatas, dari 3 indikator yang mempengaruhi jumlah penduduk miskin dalam penelitian, perlu adanya metode atau alat analisis yang sesuai digunakan untuk menemukan pengaruh 3 faktor tersebut. Pengolahan data menggunakan regresi panel, karena sesuai dengan karakteristik data pada penelitian ini. Data panel mendefinisikan gabungan antara data *cross-sectional* dan *time-series*, melibatkan pengamatan terhadap sekumpulan individu atau entitas yang sama dalam beberapa periode waktu. Intinya, ini melibatkan pengumpulan data dari individu dalam rentang waktu tertentu. (Napitupulu et al. 2021).

Menurut Baltagi (2005), regresi data panel menawarkan beberapa manfaat. Hal ini memungkinkan pengelolaan perbedaan individu, menghasilkan data yang lebih kaya dan lebih beragam dengan berkurangnya kolinearitas antar variabel, peningkatan derajat kebebasan, dan peningkatan efisiensi. Selain itu, data panel memfasilitasi pemeriksaan dinamika penyesuaian dan memungkinkan deteksi dan pengukuran efek yang mungkin terlewatkan dalam data *cross-section* atau data deret waktu saja. Selain itu, analisis data panel memungkinkan pertimbangan eksplisit heterogenitas individu dengan memasukkan variabel spesifik individu ke dalam persamaan ekonometrik, sehingga memungkinkan pengujian dan pengembangan model perilaku yang lebih canggih.

Penanggulangan kemiskinan dengan sistematis dan sinergis harus dilakukan agar tidak terjadi masalah sosial lainnya dan seluruh masyarakat mampu merasakan kehidupan yang layak. Oleh karena itu, perlu adanya penyelesaian terhadap faktor penyebab masalah tersebut (Kominfo 2011). Studi ini berusaha untuk mengeksplorasi dampak dari berbagai faktor terhadap tingkat kemiskinan.

Dengan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, terdapat kebutuhan untuk melakukan penyelidikan menyeluruh tentang dampak pembangunan manusia (IPM), Tingkat pengangguran terbuka (TPT), dan upah minimum (UMR) terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia melalui analisis data panel. Hasil yang diharapkan dari penelitian ini dapat menyumbangkan pandangan berharga bagi pembuat kebijakan ekonomi dan menjadi landasan bagi penelitian lanjutan.

## METODE

Penelitian ini mengadopsi metode kuantitatif yang memanfaatkan data sekunder. Pendekatan kuantitatif digunakan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi hubungan antara variabel dalam rentang waktu tertentu (2018-2022). Pendekatan ini melibatkan perolehan wawasan atau pemahaman melalui data numerik, yang berfungsi sebagai alat untuk meneliti variabel-variabel yang diteliti (Manik et al. 2023). Data sekunder berasal dari laporan publikasi oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia, mencakup 34 provinsi di Indonesia. Penganalisisan data diterapkan melalui metode regresi data panel dan perangkat lunak statistik EViews 12. Proses analisis data meliputi langkah-langkah mulai dari estimasi regresi, pemilihan metode estimasi model regresi panel, pengujian asumsi klasik, asumsi regresi data panel, hingga penilaian kelayakan model regresi data panel, serta penarikan kesimpulan (Napitupulu et al. 2021). Model matematika temuan regresi data panel pada penelitian ini menghasilkan output:

$$JPM_{it} = \alpha + \beta_1 IPM_{1it} + \beta_2 TPT_{2it} + \beta_3 UMR_{3it} + e_{it}$$

dimana:

$\alpha$  : konstanta

$\beta$  : koefisien regresi

- $JPM_{it}$  : Kemiskinan (jiwa)  
 $IPM_{1it}$  : Indeks Pembangunan Manusia (indeks)  
 $TPT_{2it}$  : Pengangguran (%)  
 $UMR_{3it}$  : Upah Minimum Regional (Rp)  
 $i$  : entitas ke- $i$   
 $t$  : periode ke- $t$

## HASIL

### Pemilihan Model

Pada analisis data panel, tidak semua model prediksi dapat diterapkan dalam pengolahan data. Setiap data yang diolah dipengaruhi oleh kondisi internal dan eksternal yang berbeda. Sehingga pengujian untuk menemukan mana model paling tepat digunakan perlu dilakukan (Napitupulu et al. 2021). Ada tiga pendekatan model yang diterapkan pada analisis data panel. Pertama adalah model efek umum atau CEM (Common Effect Model), termasuk model paling praktis karena tidak mempertimbangkan dimensi waktu maupun individu. Model kedua yaitu model efek tetap atau FEM (Fixed Effect Model), yang beroperasi dengan prinsip bahwa variasi antara individu dapat dipertimbangkan melalui perbedaan dalam nilai awalnya. Terakhir, model efek acak atau REM (*Random Effect Model*) yaitu model yang memproyeksikan data panel di mana variabel-variabel gangguan dapat terkait secara temporal maupun interpersonal (Baltagi 2005).

Dalam penggunaan model yang paling tepat, perlu adanya dilakukan pengujian. Berikut hasil pengujian data dalam memutuskan pilihan model paling tepat dalam penelitian ini:

1. Uji Chow, dipakai untuk menentukan dapatkah teknik model regresi panel dengan pendekatan *Fixed Effect* lebih efektif dari pada model *Common Effect*, dimana persamaan uji Chow dinyatakan sebagai berikut:

$$F = \frac{(SSE_{CEM} - SSE_{FEM}) / (N - 1)}{SSE_{FEM} / (NT - N - k)}$$

Telah dilakukan pengujian Chow pada penelitian ini, dengan temuan:

**Tabel 1.** Hasil uji Chow

Effects Test	Statistic	d.f	Prob.
Cross-section F	782.347163	(33,133)	0.0000
Cross-section Chi-square	896.511209	33	0.0000

Merujuk tabel diatas maka ditemukan nilai prob. sebesar 0.0000 (< 0.05), sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa pilihan terbaik jatuh kepada FEM (*Fixed Effect Model*).

Uji Hausman, uji ini memilih apakah FEM dan REM lebih baik dari CEM. Statistik uji Hausman diukur dari distribusi statistik Chi-Square dengan jumlah derajat kebebasan (df) sebanyak total variabel independen. Berikut adalah persamaan untuk uji Hausman :

$$H = (\beta_{RE} - \beta_{FE})^1 (\Sigma_{FE} - \Sigma_{RE})^{-1} (\beta_{RE} - \beta_{FE})$$

Telah dilakukan pengujian Hausman pada penelitian ini, dengan temuan :

**Tabel 2.** Hasil uji Hauman

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	19.517559	3	0.0002

Merujuk pada tabel diatas maka ditemukan nilai prob. sebesar 0.0002 (< 0.05), sehingga dapat disimpulkan bahwa model terbaik yang dipilih adalah *Fixed Effect Model (FEM)*.

**Uji Asumsi Klasik**

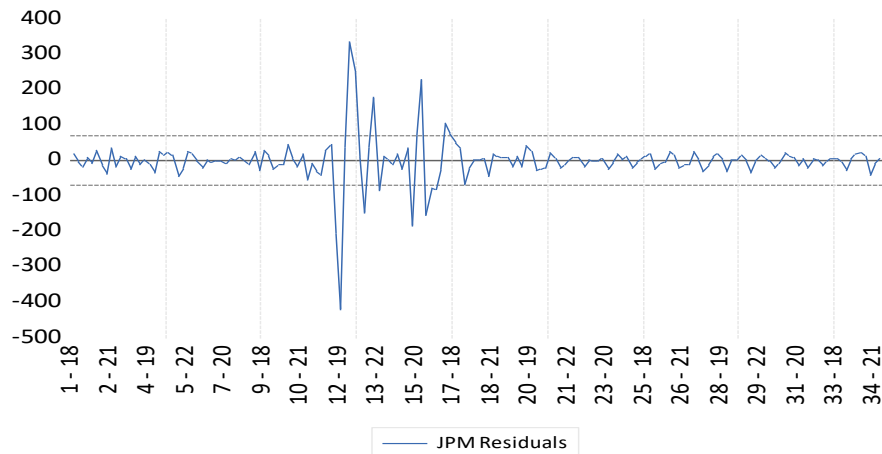
1. Uji Multikolinieritas, bermaksud menjawab benarkah ada keterkaitan variabel-variabel independen dalam suatu model. Penilaian tidak adanya multikolinieritas antara variabel independen dapat diperhatikan dari nilai korelasi setiap variabel independen dengan nilai korelasi kurang dari 0,8. Namun, jika terdapat korelasi antara variabel independen yang melebihi 0,8, maka data dianggap tidak memenuhi syarat dalam uji multikolinieritas (Napitupulu et al. 2021). Hasil uji multikolinieritas menunjukkan :

**Tabel 3.** Hasil uji Multikolinieritas

	IPM	TPT	UMR
IPM	1.000000	0.399227	0.127868
TPT	0.399227	1.000000	0.224731
UMR	0.127868	0.224731	1.000000

Berdasarkan tabel 3 maka diperoleh informasi bahwa nilai keterkaitan antar variabel bebas lebih kecil dari 0,8 maka ditarik kesimpulan tidak ditemukan multikolinieritas antar variabel bebas pada penelitian ini.

2. Uji Heteroskedastisitas, didefinisikan sebagai uji yang muncul ketika adanya eror pada model yang diamati dengan tidak menunjukkan varian yang stabil. Heteroskedastisitas biasanya terjadi pada sebaran data crosssection. Adanya gejala heteroskedastisitas dapat dilihat dari grafik residual, dimana jika grafik melampaui ambang (500 dan -500), artinya varian residual tidak sama (Napitupulu et al. 2021). Telah dilakukan uji heteroskedastisitas pada penelitian ini, dengan hasil sebagai berikut.



**Gambar 5.** Grafik uji Heteroskedastisitas

Dari grafik residual yang ditunjukkan di atas, terlihat bahwa grafik berada dalam rentang antara 334 dan -418, menunjukkan bahwa variasi residual konsisten. Sehingga, dapat dimaknai bahwa tidak ada indikasi heteroskedastisitas yang terjadi.

**Regresi Berganda**

**Tabel 4.** Hasil analisis regresi

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	6.856984	0.502407	13.64826	0.0000



IPM	-0.016689	0.007955	-2.098078	0.0378
TPT	0.018178	0.005450	3.335153	0.0011
UMR	0.102650	0.035409	2.899007	0.0044
Effects Specification				
Cross-section fixed (dummy variables)				
R-squared	0.998380		F-statistic	2276.956
Adjusted R-squared	0.997942		Prob(F-statistic)	0.000000

Dari tabel regresi yang terlampir diatas, dihasilkan persamaan data panel untuk penelitian ini beserta penjelasannya, yang dapat dirinci sebagai berikut:

$$\text{Log}(JPM_{it}) = 6.856984 - 0.016689 \text{IPM}_{1it} + 0.018178 \text{TPT}_{2it} + 0.102650 \text{UMR}_{3it} + e_{it}$$

1. Besaran koefisien konstanta sebesar 6.856984 artinya tanpa adanya variabel IPM, TPT, dan UMR maka variabel Jumlah Penduduk Miskin akan mengalami peningkatan sebesar 685%.
2. Angka koefisien untuk variabel regresi IPM bernilai negatif (-) besarnya 0.016689, maka diartikan bahwa jika variabel IPM meningkat sebesar 1.00 IPM (variabel lain konstan) maka variabel JPM menurun sebesar 1,66% dan sebaliknya.
3. Angka koefisien untuk variabel regresi TPT bernilai positif (+) besarnya 0.018178, maka diartikan bahwa jika variabel TPT meningkat 1% (variabel lain konstan) maka variabel JPM juga ikut meningkat sebesar 1,81% dan sebaliknya.
4. Angka koefisien untuk variabel regresi UMR bernilai positif (+) besarnya 0.102650, maka diartikan bahwa jika variabel UMR meningkat sebesar Rp. 1.000.000 (variabel lain konstan) maka variabel JPM juga ikut meningkat sebesar 10,26% dan sebaliknya.

### Uji T

Uji t berfungsi mengevaluasi efek parsial variabel independen terhadap variabel dependen. Pada penelitian ini, hasil analisis memperlihatkan bahwa variabel IPM memiliki nilai t-hitung sebesar 2.09807, melebihi nilai t-tabel sebesar 1.6972, dan memiliki nilai Probabilitas (Prob.) sebesar 0.0378, yang kurang dari 0.05. Hal ini mengindikasikan bahwa IPM secara signifikan memengaruhi jumlah penduduk miskin. Demikian pula, variabel TPT memiliki nilai t-hitung sebesar 3.3351, juga melebihi nilai t-tabel sebesar 1.6972, dan memiliki Prob. sebesar 0.0011, juga kurang dari 0.05, mengindikasikan TPT memiliki pengaruh yang signifikan terhadap jumlah penduduk miskin. Begitu juga dengan variabel UMR, yang memiliki nilai t-hitung sebesar 2.8990 dimana lebih besar dari t-tabel 2.0422, Prob. sebesar 0.0044, menunjukkan bahwa UMR juga berkontribusi secara signifikan terhadap jumlah penduduk miskin, seperti halnya IPM dan TPT.

### Uji F

Uji F dilaksanakan guna mengevaluasi benarkah variabel independen secara kolektif berdampak pada variabel dependen (Ghozali 2018). Hasil uji F yang dilakukan secara simultan pada Tabel 6 memperlihatkan bahwa nilai f-hitung sebesar 2276.956, melebihi nilai f-tabel sebesar 2.0369. Dilain itu, nilai Prob. (F-statistic) adalah 0.000, lebih kecil dari 0.05. Oleh sebab itu, dapat dipahami bahwa terdapat pengaruh signifikan secara kolektif simultan antara variabel IPM, TPT, dan UMR terhadap variabel dependen tersebut.

### Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)



Koefisien  $R^2$  menilai kemampuan model dalam menjelaskan varians yang diamati dalam variabel dependen. Menurut Ghozali (2018) jika nilai *R-Squared* mendekati 1, mengindikasikan bahwa variabel independen memiliki hampir keseluruhan informasi yang mendukung untuk memperkirakan perubahan pada variabel dependen. Sebaliknya, jika nilai koefisien determinasi kurang dari 0,5, menandakan bahwa kemampuan variabel independen untuk representasikan variasi variabel dependen itu terbatas. Pada penelitian ini memiliki nilai *R-squared* 0.9983 yang dapat dilihat pada tabel 6 maka dapat ditarik kesimpulan variabel signifikan IPM, TPT dan UMR terhadap nilai JPM sebesar 99,83 %, sedangkan sisanya 0,17 % didukung oleh variabel lain yang tidak berkontribusi pada penelitian ini.

## **PEMBAHASAN**

### **Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap Jumlah Penduduk Miskin**

Menurut Nugroho & Clarissa (2019) dalam publikasi IPM oleh Badan Statistik Indonesia mengatakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menilai prestasi pembangunan manusia dengan mempertimbangkan beberapa unsur dasar dalam meningkatkan standar hidup. Menurut Backer (1964) sebagai tokoh utama pengembang teori human capital mengatakan pembangunan manusia merujuk pada pengetahuan, keterampilan, kesehatan, dan atribut lainnya yang dimiliki individu yang membuat mereka lebih produktif secara ekonomi. Hal tersebut sejalan dengan penyebab kemiskinan yaitu ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar seperti kesehatan karena kurangnya pengetahuan dan keterampilan. Sehingga peningkatan kualitas pembangunan manusia berbanding terbalik dengan kemiskinan.

Temuan penelitian memperlihatkan adanya pengaruh secara signifikan antara pembangunan manusia (IPM) terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia. Secara khusus, setiap peningkatan sebesar 1,00 indeks IPM berhubungan dengan penurunan sebesar 1,66% dalam jumlah penduduk miskin di Indonesia, dan sebaliknya. Hubungan ini diasumsikan berlaku saat variabel independen lain dalam penelitian tetap tidak berubah. Temuan ini mendukung teori modal manusia yang menyiratkan adanya hubungan terbalik antara IPM dan kemiskinan.

Temuan dari analisis ini searah dengan temuan dalam studi Prasetyoningrum and Sukmawati (2018), Fadila (2020), dan (Hasibuan 2023) dimana IPM berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Merujuk pada temuan, perkembangan kualitas sumber daya manusia mengurangi tingkat kemiskinan. Ketika pendidikan, salah satu dari tiga komponen utama Indeks Pembangunan Manusia, hal ini akan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, sehingga menciptakan tenaga kerja yang lebih terampil. Akibatnya, memenuhi kebutuhan hidup akan menjadi lebih mudah, yang pada gilirannya akan mengurangi tingkat kemiskinan.

### **Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Terhadap Jumlah Penduduk Miskin**

Pengangguran terbuka adalah istilah untuk merujuk pada individu yang aktif mencari pekerjaan tetapi belum berhasil mendapatkan satu. Mereka telah melakukan upaya maksimal dalam mencari pekerjaan, tetapi kesempatan yang tersedia tidak sejalan dengan latar belakang pendidikan mereka atau mereka mungkin kurang inisiatif dalam mencari pekerjaan (Ritonga and Firdaus 2007). Teori siklus kemiskinan yang dikemukakan oleh Ragnar Nurkse mengatakan bahwa pengangguran dapat menjadi salah satu faktor penyebab kemiskinan, terutama selama periode resesi atau penurunan ekonomi (Prawoto 2009). Pengangguran yang tinggi dapat menyebabkan pendapatan rumah tangga menurun atau bahkan kehilangan sumber pendapatan secara keseluruhan, sehingga meningkatkan tingkat kemiskinan dalam masyarakat. Sehingga penurunan tingkat pengangguran dapat berdampak positif bagi angka kemiskinan.

Temuan penelitian memperlihatkan adanya hubungan signifikan antara pengangguran terbuka (TPT) dan tingkat kemiskinan di Indonesia. Secara khusus, setiap peningkatan sebesar 1% dalam TPT diikuti dengan peningkatan sebesar 1,81% dalam jumlah penduduk miskin di Indonesia, dan sebaliknya. Hubungan ini berlaku dengan asumsi bahwa variabel-variabel lain yang diselidiki dalam analisis ini tetap konstan. Temuan ini konsisten dengan teori siklus kemiskinan yang mengindikasikan hubungan positif antara pengangguran terbuka terhadap tingkat kemiskinan.

Penelitian ini searah dengan hasil penelitian (Purboningtyas et al. 2020), Yustie (2017), Sembiring (2020) dimana TPT memengaruhi jumlah penduduk miskin secara signifikan dan memiliki arah positif. Tetapi ada beberapa penelitian yang memiliki hasil berbeda, penelitian tersebut dilakukan oleh Zuhdiyati et al. (2015) yang mengungkapkan bahwa pengangguran terbuka (TPT) tidak selamanya mempengaruhi secara positif terhadap kemiskinan. Pengaruh negatif tersebut terjadi karena banyak masyarakat yang menganggur tetapi tidak berada dalam garis kemiskinan. Masyarakat tersebut umumnya berada dalam usia 20-30 tahun, dimana banyak masih ditanggung oleh keluarga dalam memenuhi kebutuhan mendasar agar terlepas dari indikator kemiskinan.

### **Pengaruh Upah Minimum Regional (UMR) Terhadap Jumlah Penduduk Miskin**

Upah Minimum Regional (UMR) adalah jumlah upah minimum yang diatur oleh pemerintah daerah untuk daerah tertentu dalam suatu negara. Regulasi UMR tercantum dalam Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, menegaskan regulasi UMR dilakukan oleh pemerintah provinsi atau kabupaten/kota, dengan mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk tingkat inflasi, pertumbuhan ekonomi, tingkat produktivitas, dan standar biaya hidup di wilayah tersebut. Teori Neo Klasik yang dikemukakan oleh Robert Solow dan Trevor Swan mengatakan tidak selamanya upah yang tinggi dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di suatu daerah yang luas. Hal tersebut terjadi karena upah hanya diperuntukkan bagi masyarakat yang memiliki pekerjaan, sedangkan masyarakat miskin umumnya tidak memiliki pekerjaan. Dari pernyataan Teori Neo Klasik mengidentifikasi bahwa UMR memiliki pengaruh dua arah terhadap jumlah penduduk miskin.

Temuan analisis menunjukkan bahwa upah minimum (UMR) memiliki dampak positif secara signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia. Sebagai ilustrasi, jika UMR naik sebesar Rp 1.000.000,-, maka jumlah penduduk miskin di Indonesia cenderung meningkat sebesar 10,26%, dan sebaliknya. Namun, hasil ini bersyarat bahwa variabel lain dalam penelitian tetap konstan. Penemuan ini searah dengan teori Neo Klasik, yang menyatakan bahwa UMR tidak selalu berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengurangan kemiskinan, karena UMR hanya berlaku bagi pekerja yang terikat perjanjian kerja. Perlu dicatat bahwa periode penelitian ini sangat dipengaruhi oleh pandemi Covid-19 dalam berbagai aspek. Kenaikan UMR juga terkait dengan peningkatan jumlah penduduk miskin karena banyak perusahaan melakukan PHK terhadap karyawan mereka, yang pada gilirannya meningkatkan tingkat pengangguran dan berdampak pada kemiskinan.

Beberapa hasil analisis memiliki kesamaan dengan temuan penelitian yang dilakukan oleh Prasetyo (2022) dan Putri and Putri (2021) dimana UMR berpengaruh positif terhadap kemiskinan. Penelitian lainnya yang berbeda dengan hasil penelitian ini yaitu penelitian Sabyan dan Widyanti (2022) dan Dongoran et al. (2023) yang mengatakan bahwa UMR memiliki pengaruh secara negatif terhadap kemiskinan. Menurut penelitian tersebut bahwa dengan upah yang tinggi dapat berpengaruh pada peningkatan kualitas hidup masyarakat, hal tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan yang ada.

### **PENUTUP**

Berdasarkan temuan dari analisis regresi, dapat disimpulkan bahwa model tersebut mampu menjelaskan 99,83% variasi dari faktor-faktor yang diteliti yang berdampak pada jumlah orang miskin di Indonesia. Hasil penelitian memperlihatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memengaruhi secara negatif yang signifikan, sedangkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Upah Minimum Regional (UMR) menunjukkan dampak positif secara signifikan terhadap tingkat kemiskinan di 34 Provinsi Indonesia. Di antara faktor-faktor tersebut, TPT muncul sebagai faktor penentu kemiskinan yang paling berpengaruh dalam lingkup penelitian ini. Hal tersebut terjadi karena pengangguran memiliki kontribusi terbanyak dalam peningkatan kemiskinan di Indonesia, dimana masyarakat yang menganggur umumnya tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara mandiri.

Dari hasil penelitian ini diharapkan pemerintah sebagai penentu kebijakan ekonomi dapat memperhatikan kondisi ekonomi secara keseluruhan, baik secara makro maupun mikro, baik secara nasional maupun internasional guna menurunkan angka jumlah penduduk miskin di Indonesia. Pemerintah harus aktif dalam memperluas lapangan pekerjaan dan menekan angka pengangguran dengan cara mengundang investor dalam menanam modalnya di Indonesia dan melakukan pelatihan kepada angkatan kerja agar angkatan kerja nantinya dapat bersaing dengan tenaga kerja luar. Dengan adanya kebijakan tersebut diharapkan dapat menurunkan tingkat kemiskinan di Indonesia.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Adisasmitha, Raharjo. 2013. *Pertumbuhan Wilayah & Wilayah Pertumbuhan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Backer, Gary S. 1964. *Human Capital : A Theoretical and Empirical Analysis with Special Reference to Education*. New York: National Bureau of economic.
- Baltagi, Badi H. 2005. *Econometric Analysis of Panel Data*. 3rd ed. Chippenham: Antony Rowe Ltd.
- Dongoran, Faisal R., Sri Dai Sulfina, Syamsul Allim Syah, and Triana Siahaan. 2023. "Analisis Pengaruh Ketimpangan Pendapatan Dan Upah Minimum Regional Terhadap Kemiskinan Di Sumatera Utara." *Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis (JEMB)* 1(2): 198–207.
- Fadila, Radiatul. 2020. "Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia ( IPM ) Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Sumatera Barat Periode Tahun." *EcoGen* 3(1): 120–233.
- Ghozali, Imam. 2018. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS*. Semarang: Bandan Penerbit Undip.
- Harahap, Sofyan. 2006. *Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan*. 5th ed. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Hasibuan, Lailan Syafrina. 2023. "Analisis Pengaruh IPM, Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pengangguran Dan Kemiskinan Di Indonesia." *Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora* 8(1): 53–62. <https://doi.org/10.32696/jp2sh.v8i1.2075>.
- Indonesia. 2003. *Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan*. Indonesia. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/43013>.
- Kominfo. 2011. *Program Penanggulangan Kemiskinan Kabinet Indonesia Bersatu II*. Jakarta: Kementerian Komunikasi dan Informatika RI.
- Kuncoro, Mudrajad. 2004. *Otonomi Daerah Dan Pembangunan Daerah: Reformasi, Perencanaan, Strategi, Dan Peluang*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Manik, Ester et al. 2023. "Comparison of Normality Testing with Chi Kuadrat Calculations and Tables for the Statistical Value Departement of Elementary School Education Student at the University of Jember." *API Conference Proceedings* 2679(1). <https://doi.org/10.1063/5.0111307>.
- Napitupulu, Runggu Basmandala et al. 2021. *Penelitian Bisnis: Teknik Dan Analisis Data Dengan SPSS-STATA-EVIEWS*. 1st ed. Medan: Madenatera.
- Nugroho, Adi, and Alvina Clarissa. 2019. *Badan Pusat Statistik Indonesia Indeks Pembangunan Manusia 2019*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Prasetyo, Maulana Rizki. 2022. "Pengaruh Tingkat Pengangguran Dan Upah Minimum Regional Terhadap Kemiskinan Kota Tasikmalaya Tahun 2017–2021." *Jurma; Ilmu Ekonomi* 3(1): 33–38.

- <http://jurnal.unsil.ac.id/index.php/welfare>.
- Prasetyoningrum, Ari Kristin, and U Sulia Sukmawati. 2018. "Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia ( IPM ), Pertumbuhan Ekonomi Dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Indonesia." *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah* 6: 217–40.
- Prawoto, Nano. 2009. "Memahami Kemiskinan Dan Mengatasi Penanggulangannya." *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan* 9(1): 56–68. <https://journal.umy.ac.id/index.php/esp/article/view/1530>.
- Purboningtyas, Indah et al. 2020. "Analisis Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka Dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Jawa Tengah." *Jurnal Sainika Unpam* 3(1): 81–88. <https://core.ac.uk/download/pdf/337609876.pdf>.
- Putri, Erliza Millenia, and Dewi Zaini Putri. 2021. "Pengaruh Upah Minimum , Tingkat Pengangguran Terbuka , Pendidikan Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Kemiskinan Di." *Ecosains: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Pembangunan* 10(2): 106–14. <http://ejournal.unp.ac.id/index.php/ekosains>.
- Ritonga, and Y Firdaus. 2007. *Ekonomi Dan Akuntansi*. Jakarta: PT. Phibeta Aneka Guna.
- Sabyan, Muhammad, and Rina Widyanti. 2022. "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Upah Minimum Regional Terhadap Kemiskinan Di Kota Jambi." *Jurnal Menara Ekonomi : Penelitian dan Kajian Ilmiah Bidang Ekonomi* 8(3): 311–15.
- Saputra, Wisnu Adhi. 2011. "Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, PDRB, IPM, Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Kabupaten/Kota Jawa Tengah." Universitas Diponegoro.
- Sembiring, Febriangga. 2020. "Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi , IPM , Pengangguran Terbuka Dan Angkatan Kerja Terhadap Kemiskinan Di Sumatera Utara." *Serambi Engineering* V(2): 974–84.
- Sukirno, Sadono. 2019. *Makroekonomi Teori Pengantar*. Depok: Rajawali Pers.
- Suparmoko. 2009. *Pengantar Ekonomika Makro*. Yogyakarta: BPFY-Yogyakarta.
- Suryawati. 2004. *Teori Ekonomi Mikro*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Yustie, Renta. 2017. "Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Terhadap Kemiskinan Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Jawa Timur." *Equilibrium* Oktober: 49–57. <http://dx.doi.org/10.30742/equilibrium.v0i0.418>.
- Zuhdiyati, Noor et al. 2015. "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan Di Indonesia Selama Lima Tahun Terakhir ( Studi Kasus Pada 33 Provinsi )." (Atalay): 27–31.
- Zulkifli. 2016. "Pengaruh Upah Minimum Regional (UMR) Dan Kontribusi Sektor Industri Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan Di Sulawesi Selatan." *EcceS: Economics, Social, and Development Studies* 3(2).